



Dinamika Buruh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Tahun 1916-1928

¹Ardhiani Regita Sukmaningtyas, ²Nanda Julian Utama

^{1,2}Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ardhiani.sukma@gmail.com, ²nanda.julian@mail.unnes.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-12-2024

Disetujui: 31-12-2024

Kata Kunci:

Buruh Pelabuhan;

Dinamika;

Pemberontakan;

Pemogokan.

Keywords:

Port Workers;

Dynamics;

Rebellion;

Strike.

ABSTRAK

Abstrak: Keberadaan Kota Semarang di Pulau Jawa cukup penting karena menjadi suatu jaringan perdagangan yang penting bagi Nusantara maupun internasional pada saat itu. Kemajuan ini tetap memiliki sisi negatif, yaitu kapitalisme di Semarang yang tidak berpihak pada nasib kaum buruh dan hanya mengeruk keuntungan dari para buruh yang datang bekerja, disertai tidak adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari para buruh tersebut. Sneevliet dan Semaun yang merupakan tokoh komunis menentang pengaruh kapitalis yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggerakkan serikat-serikat buruh. Yang nantinya pada tahun 1919, Semaun yang tergabung dalam Serikat Islam mendirikan organisasi sendiri yaitu Havenarbeidersbond yang nantinya berganti nama menjadi Serikat Laut dan Gudang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, terbentuk organisasi-organisasi buruh pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selanjutnya, organisasi ini melakukan aksi-aksi pemogokan kerja untuk menuntut adanya kenaikan upah dan kesejahteraan kaum buruh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, organisasi ini justru terlibat dan ditunggangi oleh PKI. Pemerintah pada saat itu tentunya tidak berkenan dengan organisasi buruh yang berafiliasi dengan PKI. Hingga pada akhirnya banyak pengangkapan dan pengasingan buruh dan anggota-anggota PKI, serta meredupnya kegiatan organisasi buruh pelabuhan di Semarang.

Abstract: The existence of the city of Semarang on the island of Java was quite important because it became an important trade network for the archipelago and the world at that time. This progress still has a negative side, namely capitalism in Semarang which does not side with the fate of the workers and only profits from the workers who come to work, accompanied by no efforts to improve the welfare of these workers. Sneevliet and Semaun who were communist figures opposed the capitalist influence brought by the Netherlands colonial government by mobilizing trade unions. Later in 1919, Semaun, who was a member of the Islamic Union, established his own organization, namely Havenarbeidersbond which was later renamed the Sea and Warehouse Union. The method used in this study is the historical research method by Kuntowijoyo, namely: topic selection, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this study show that in an effort to improve the welfare of workers, Tanjung Emas Semarang port labor organizations were formed. Furthermore, this organization carried out strike actions to demand an increase in wages and the welfare of workers. However, in its implementation, this organization was actually involved and ridden by the PKI. The government at that time certainly did not like labor organizations affiliated with the PKI. Until finally many arrests and exiles of workers and PKI members, as well as the dimming of the activities of port labor organizations in Semarang.



<https://doi.org/10.31764/historis.v9i2.26811>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Semarang merupakan sebuah kota yang menarik di Pulau Jawa dan disebut sebagai Kota Pelabuhan.

Semarang memiliki wilayah yang strategis untuk dibangunnya sebuah pelabuhan besar sebagai salah satu pendukung dari aktivitas kemaritiman di Jawa.

Kondisi ini membuat wilayah di sekitarnya mengalami dinamika-dinamika yang terjadi pada masyarakatnya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya (Kirana, 2015). Di samping itu, mulai berdatangan buruh-buruh yang bekerja pada pelabuhan karena kapal yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas yang bertujuan untuk ekspor-impor pada masa kolonial hingga setelah kemerdekaan semakin bertambah. Buruh-buruh ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dari pelabuhan ini.

Semarang menjadi salah satu wilayah yang menghubungkan daerah hinterland dengan daerah foreland, sehingga keberadaan Kota Semarang di Pulau Jawa cukup penting karena menjadi suatu jaringan perdagangan yang penting bagi Nusantara maupun internasional pada saat itu. Didukung dengan adanya pelabuhan besar yang mempermudah lalu lintas perdagangan dengan berbagai bangsa melalui jalur laut sehingga dapat menambah sumber pendapatan daerah (Andhika, S. 2014).

Perkembangan Kota Semarang pada masa kolonial ini terbilang sukses dan mengalami kemajuan sehingga menarik minat banyak buruh untuk datang bekerja pada perindustrian di kota ini. Kemajuan ini tetap memiliki sisi negatif, yaitu kapitalisme di Semarang yang tidak berpihak pada nasib kaum buruh dan hanya mengeruk keuntungan dari para buruh yang datang bekerja, disertai tidak adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari para buruh tersebut (Suhartono, 1994).

Pada tahun 1913 Sneevliet yang seorang tokoh sosialis datang, dan Semaun yang merupakan tokoh komunis pindah ke Semarang pada tahun 1916. Keduanya menentang pengaruh kapitalis yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggerakkan serikat-serikat buruh. Yang nantinya pada tahun 1919, Semaun yang tergabung dalam Serikat Islam (SI) mendirikan organisasi sendiri yaitu *Havenarbeidersbond* (HAB) yang nantinya berganti nama menjadi Serikat Laut dan Gudang (serilagu) (Novita, A. 2014).

Sebelumnya pada tahun 1918, buruh-buruh yang melakukan mogok kerja di pelabuhan Tanjung Emas adalah para buruh dari kapal tongkang yang pada dasarnya tidak takut untuk melakukan pemberontakan dan pemogokan karena para buruh ini termasuk ke dalam buruh yang terampil dan dapat dikatakan sebagai buruh yang lebih elit dibanding

golongan buruh yang lain, sehingga dapat melakukan pemogokan tanpa harus digerakkan oleh organisasi buruh terlebih dahulu. Hasil dari pemogokan yang dilakukan oleh buruh tongkang ini dapat dikatakan tidak memuaskan karena kurang berhasil, tetapi cukup untuk membuat peringatan bahwa aksi seperti ini dapat menjadi masalah yang cukup serius terutama bagi pihak-pihak juragan perusahaan bongkar muat Hinda Belanda, *Semarangche Stoomboot en Prauwenveer* (SSPV) (Maulida, F. H. 2020).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Hal tersebut meliputi fakta dari suatu peristiwa, sesuatu yang konkret yang terbatas dalam waktu serta tempat tertentu, dan harus berdasarkan kebenaran serta bersifat objektif. Adapun menurut Kuntowijoyo (2005), terdapat lima tahapan dari penulisan penelitian sejarah yaitu:

Pertama, pemilihan topik. Penulisan ini mengambil dan membatasi pada peristiwa di pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun 1916-1928. Kedekatan intelektual dapat berarti bahwa penulis harus dapat menguasai topik yang dituliskannya karena sudah membaca dan memahami literatur tentang sesuatu yang ditelitinya.

Kedua, heuristik atau pengumpulan sumber yang terbagi menjadi sumber primer dan sekunder. Pada sumber primer, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, penulis membaca secara langsung arsip-arsip yang ditemukan pada beberapa website seperti delpher, Jstor, Researchgate, perpustakaan, dan e-book. Sedangkan sumber sekunder, didapatkan berasal dari banyak tempat, seperti Perpustakaan Jurusan Sejarah dan Perpustakaan Universitas Negeri Semarang (Rumah Ilmu), Perpustakaan Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Pada konteks penelitian sejarah, verifikasi menjadi hal yang penting guna melakukan pertimbangan ulang dan perhitungan mengenai sumber-sumber yang telah didapat yang kemudian diambil serta dinilai apakah sumber tersebut relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

Keempat, interpretasi yang berupa menganalisis data dan sumber dalam bentuk arsip, koran sezaman,

dan penelitian dari peneliti lain. Selanjutnya, dengan interpretasi dapat menentukan dan menemukan hal yang berkaitan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu penulis dapat menangkap inti dari sumber dan mendapatkan fakta yang ilmiah dan logis.

Kelima, historiografi atau menuliskan data, yang sebelumnya telah diinterpretasi menjadi satu serta dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Selanjutnya, disusun secara sistematis sesuai dengan data yang telah diperoleh tanpa ada hal yang dikurangi atau dilebihkan. Tahap ini juga menuliskan secara kronologis agar pembaca tidak mengalami kebingungan yang dapat mengurangi minat baca.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pelabuhan Semarang ditentukan oleh Kali Semarang yang mengalir ke Laut Jawa yang memisahkan Semarang. Ada banyak lumpur di sungai, dan sulit bagi kapal untuk berlabuh. Lumpur yang mengalir ke sungai-sungai utama Semarang juga disertai endapan pasir dengan ketebalan 5 sampai 10 m. hal ini berdampak pada pendangkalan daerah sungai dan pelabuhan. Pemerintah pada saat itu melakukan upaya pengerukan pada dasar sungai, walaupun tetap saja terjadi pendangkalan secara terus menerus (Nurhajarini, D. R. dkk. 2019: 30).

Dengan makin berkembangnya kota, Semarang menjadi salah satu kota tujuan urbanisasi, menyebabkan beragamnya etnis yang masuk ke Semarang, terutama Jawa atau pribumi, Eropa, Melayu, Tionghoa, Arab, serta India. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya buruh yang datang dari desa ke Semarang (Nur, Laili Mardhiyani. 2015).

1. Munculnya Pemikiran tentang Kesadaran Kelas Buruh

Kesadaran akan kelas buruh memang berhubungan dengan faktor perekonomian yang menjadi titik utamanya serta nantinya menjadi sumber akan protes-protes yang dilakukan oleh buruh. Gerakan-gerakan pemogokan yang dilakukan oleh para buruh ini tentunya memiliki faktor pendorong yang cukup kuat, yaitu:

Pertama, adanya sebuah pertentangan serta perbedaan yang ada diantara masyarakat akibat munculnya perbedaan kelas pada internal seperti perbedaan-perbedaan mengenai ras, etnis, hingga gender, serta perbedaan mengenai tempat tinggal dan tempat masyarakat tersebut bekerja. Kedua,

bahwa representasi politik atau sebuah aktivitas di mana masyarakat ikut hadir dan mengatasnamakan "demi rakyat" terkadang melenceng dari realitas dari masyarakat tersebut (Ingleson, J. 1983). Pada umumnya untuk memperbaiki standar kehidupan dari masyarakat dan buruh pada khususnya, diperlukannya transformasi pada sistem sosial dan politik agar terciptanya persamaan kelas sebagai warga negara dan hak sebagai manusia (Sandra. 1961: 65).

Dalam masa-masa sulit dunia perburuhan, VSTP menjadi organisasi buruh yang penting dalam gerakan-gerakan buruh di Semarang. VSTP didirikan oleh tokoh sosialis Hindia Belanda yaitu C.J Hulshoff dan H.W Dekker pada tahun 1908. Tidak lepas dari peran seorang Sneevliet, organisasi VSTP menjadi serikat atau organisasi pertama yang memiliki keanggotaan masyarakat pribumi, baik yang belum mengikuti pendidikan barat maupun yang sudah berpendidikan barat, walaupun dipimpin oleh orang-orang barat. Organisasi ini menjadi wadah dalam mempersatukan buruh kereta api, baik pemerintah maupun swasta, selain menjadi organisasi yang mempelopori adanya pergerakan buruh di Semarang (Hasibuan, S. 1968: hlm. 15).

2. Buruh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Pelabuhan Semarang memiliki kedalaman yang dapat dikatakan dangkal, sehingga hanya dapat dimasukkan dalam kategori pelabuhan pantai saja, yakni hanya kapal-kapal dengan jangkauan pelayaran antar pulau saja yang dapat bersandar di pelabuhan ini. Kapal-kapal kecil saja yang bisa menepi hingga ke dermaga pelabuhan, sehingga mengakibatkan untuk melakukan aktivitas bongkar muat barang-barang yang berasal dari kapal besar atau kapal tongkang dilakukan di laut.

Setelah melakukan bongkar muat, kapal kecil tadi barulah akan bersandar ke dermaga untuk melanjutkan pembongkaran di gudang atau truk yang ada di pelabuhan Semarang. Angkutan bandar adalah sebutan dari aktivitas bongkar muat di kapal tongkang tersebut. Sejak tahun 1918, *Semarangsche Stoomboot en Prauwenveer* (SSPV) menjadi perusahaan angkutan bandar satu-satunya yang beroperasi di pelabuhan Semarang (Gedenkboek der Gemeente Semarang, 1906-1931).

Organisasi buruh pelabuhan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran kapal. Dalam sistem perburuhan mereka dibagi menjadi dua jenis buruh yaitu *Pertama*, buruh darat adalah buruh yang semua kegiatannya dilakukan dalam suatu wilayah pelabuhan khususnya di lingkungan daratan. *Kedua*, buruh maritim laut yaitu mereka yang bekerja di kapal-kapal baik dalam rangka pelayaran antar pulau maupun antar negara. Berdasarkan pekerjaannya, dari tahun 1919 mereka di bedakan menjadi tiga jenis yaitu *Pertama*, buruh atau kuli perahu tongkang adalah mereka yang bekerja dengan menggunakan tongkang yang ditarik dengan kapal penghela dalam aktifitas bongkar muat dari kapal samudra dan sebaliknya. *Kedua*, buruh darat adalah buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat dari kapal tongkang atau kapal-kapal yang merapat ke dermaga pelabuhan untuk dipindahkan ke gudang atau truk dan sebaliknya. *Ketiga*, para kuli kapal adalah buruh lepas yang hanya memperoleh upah jika mendapatkan pekerjaan. Buruh ini bekerja pada kapal laut yang melakukan bongkar muat di kapal-kapal besar ke kapal tongkang (Supriyono, 2008).

Dilihat dari posisinya, buruh tongkang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat untuk menghadapi majikannya. Hal ini disebabkan pekerjaan sebagai buruh tongkang memiliki kesulitan yang cukup tinggi dan membutuhkan keahlian khusus serta jam terbang yang tinggi juga. Sulitnya buruh tongkang untuk digantikan oleh buruh biasa apabila para buruh tongkang ini melakukan mogok kerja secara massal. Hal ini menjadi alasan mengapa para buruh tongkang berani untuk melakukan aksi mogok kerja karena resiko dilakukan pemecatan cukup kecil dibandingkan dengan buruh biasa atau buruh lepas (*Verslag van het Bestuur N.V. Semarangsch Stoomboot en Prauwenveer over het jaar 1924*).

3. Serikat Buruh dan Pemogokan Buruh di Semarang Tahun 1920-an

Sekitar tahun 1917 hingga 1920, perubahan yang semakin cepat serta zaman yang mulai bergerak dan mulai memasuki bagian akhir dari Perang Dunia I. Setelah perang usai, muncul SI yang ditandai dengan berbagai macam vergadering-vergadering, selanjutnya merupakan masa pemogokan yang ditandai dengan banyaknya aksi pergerakan di

berbagai organisasi. Semaun, salah satu aktivis ISDV kemudian muncul sebagai kepala SI Semarang dan VSTP (Shiraishi, T. 1997). Gerakan-gerakan buruh di Semarang semakin lama semakin terorganisir dan berjalan menjadi lebih baik karena adanya pengaruh dari Semaun, serta menjadikan berbagai pergerakan politik semakin marak di Semarang (Supriyono, A. 2008).

Sebelumnya terjadi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tongkang yang bekerja di perusahaan SSPV. Pemogokan ini terjadi dimulai dari tanggal 9 November 1918 yang terjadi karena para buruh tongkang melakukan aksi untuk menuntut peningkatan upah dari yang awalnya 22,50 *gulden* menjadi 30 *gulden* perbulan, tetapi ditolak oleh pihak SSPV (*Verslag van den Raad van Commissarissen van het SSPV over het jaar 1925 (1926)*). Aktivitas bongkar muat yang harusnya dilakukan oleh perusahaan SSPV pada dermaga ke kapal-kapal yang berlabuh di lautan (*reede*) atau sebaliknya, mengalami keterlambatan akibat dari pemogokan para buruh tongkang.

Aksi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tongkang ini awalnya cukup berhasil karena sulitnya mencari pengganti buruh yang bekerja di pelabuhan Semarang. Semakin lumpuhnya angkutan bandar mengakibatkan para pengusaha yang bergabung dalam *Handelsvereenging Semarang* memutuskan untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah oleh para buruh. Namun terdapat usulan dari wakil persekutuan pengusaha Cina (Sing Boe) yang menyatakan bersedia untuk mendatangkan kekurangan *matroos* dari Singapura, sehingga keputusan sebelumnya telah batal. Para pemogok kerja terpaksa mundur dan menyerah dengan sendirinya setelah kurang lebih tiga minggu melakukan aksi mogok kerja dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka dengan tetap mengikuti pada peraturan lama tentang upah dari para pekerja dari para pekerja (*Verslag van den Handelsvereeniging te Semarang over het jaar 1919*).

Penyebab dari kegagalan pemogokan buruh tongkang 1918 dalam menuntut kenaikan upah serta ganti rugi adalah karena pemogokan tersebut masih dilakukan secara sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik dan serempak (*Verslag van den Handelsvereeniging te Semarang over het jaar 1919*). Selanjutnya didirikan sebuah serikat buruh pelabuhan oleh Semaun yang bernama *Havenarbeidersbond (HAB)* pada tahun 1919, yang

berganti nama menjadi Serikat Laut dan Gudang (serilagu). Yang pada tahun 1924, Serilagu dan Serikat Kaum Buruh Pelabuhan di Surabaya dan Batavia, bersatu menjadi Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL) (Supriyono. 2013).

Pada tahun 1925 terjadi pemogokan oleh para buruh tongkang yang bekerja di perusahaan SSPV untuk yang kedua kalinya. Pemogokan ini merupakan salah satu pemogokan yang terjadi serentak di berbagai perusahaan yang ada di Semarang. Hal ini berarti bahwa pemogokan-pemogokan yang terjadi memiliki sebuah keterkaitan di mana ingin adanya peningkatan taraf hidup bagi para buruh di Semarang terutama di seluruh Hindia Belanda. Tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pihak SSPV mengakibatkan semakin banyaknya buruh tongkang yang melakukan aksi mogok kerja hingga sebanyak 1000-1100 orang yang melakukan aksi mogok kerja (Supriyono. 2013: 67-68). Para petinggi SPPL maupun PKI memang berujung melakukan intervensi dalam aksi pemogokan yang terjadi pada saat itu, hingga meluas ke buruh-buruh yang bekerja di bengkel-bengkel. Pada tanggal 8 Agustus 1925 barulah secara resmi SPPL ikut terlibat (*Verslag van den Raad van Commissarissen van het SSPV over het jaar 1925* (1926)).

Pihak buruh pada saat itu menanggung resiko yang lebih besar daripada pihak perusahaan SSPV, yaitu menjadi pengangguran. Hal ini dibuktikan bahwa banyak buruh yang kemudian mendaftarkan diri kembali ke perusahaan sejak awal bulan September. Para buruh yang mogok kerja sebagian ada yang pulang ke desanya masing-masing, dan pihak SSPV dibantu dengan aparat desa berusaha membujuk kembali secara perorangan agar para buruh dapat bekerja kembali di perusahaan SSPV. Akhirnya mulai pada pertengahan bulan September, para buruh pelabuhan yang melakukan mogok kerja mulai berdatangan kembali dan aktivitas perusahaan sudah normal kembali sejak awal Oktober (*De Locomotief*, 5 Agustus 1925).

Untuk mengatasi pemogokan-pemogokan buruh tahun 1925, pemerintah kolonial melakukan pengejaran dan penahanan terhadap para pengurus I PKI, dan melarang penerbitan harian nasional komunis dan organisasi lainnya. Kemudian untuk menghindari adanya pemogokan-pemogokan buruh susulan dengan didalangi oleh orang-orang yang

sama, perusahaan SSPV mendata para buruh yang bekerja dan sangat selektif dalam menerima dan mengangkat menjadi buruh tetap, serta secara inisiatif menaikkan upah buruhnya (*Verslag van den Raad van Commissarissen van het SSPV over het jaar 1926*).

4. Dampak dari Pemogokan Buruh dan Pemberontakan PKI 1927

Pembahasan mengenai adanya pemberontakan 1 Mei tahun 1926 memang sudah merebak sejak tahun 1925. Tekanan-tekanan pun semakin terasa pada daerah yang aktif akan PKI. Kabar mengenai pemberontakan semakin meluas dari mulut ke mulut, sumber yang tidak jelas dari mana tetapi menimbulkan ancaman terus menerus dan menjadi sebuah teka teki kapan pastinya pemberontakan ini akan meletus. Pada tanggal 1 Mei yang merupakan hari kaum proletar internasional pun menjadi hari meletusnya pemberontakan para buruh sebagai salah satu bentuk protes terhadap kaum proletar (McVey. 1965: 572).

Pada saat itu memang pemberontakan PKI mengalami kegagalan, tetapi pemerintah Belanda tidak ingin kejadian tersebut terus terulang kembali. Dalam pemberontakan yang memang telah diperkirakan gagal itu pula, banyak anggota bahkan mungkin ribuan anggota dan non-anggota yang dapat dihasut yang telah dikorbankan dan berakhir ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya (Poesponegoro, dkk, 2010:365).

Paham komunis masih ada di Indonesia pada saat itu, akan tetapi memang pada tanggal 23 Maret 1928 PKI telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Komunisme yang masih tersisa di Indonesia itulah yang nantinya akan meletus lagi pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya atau pada tahun 1946. Perumusan UUD 1945 hingga Pancasila, tidak ada penggunaan kalimat-kalimat yang mendukung adanya komunis di Indonesia karena memang tidak mengambil andil dalam segala perumusan maupun kemerdekaan bangsa ini (DAGP Hatama 2022: 69).

Pada pemberontakan PKI tahun 1926-1927 ini, di mana segelintir umat Islam pertama dan terakhir kalinya bergabung bersama dengan PKI menjadi sebuah wadah untuk melakukan pergerakan melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pemberontakan PKI tahun 1927 yang terjadi di Silungkang, dituturkan senada oleh Wretheim, terdiri dari sedikit golongan masyarakat selain buruh, seperti para guru agama yang berasal dari para pemuda yang memang sudah terpengaruh paham komunis. Sisanya adalah golongan-golongan buruh pertanian yang sudah menjadi sangat miskin, para pedagang yang mulai mengalami kebangkrutan, dan para buruh perkebunan (Nurhabsyah, 2004: 6).

Gerakan-gerakan melawan penjajah juga tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki semata, tetapi juga kaum perempuan. Dengan berlandaskan emansipasi dan nasionalisme yang telah ditanamkan oleh Kartini, berdiri organisasi perempuan pertama yaitu Putri Mardika yang berkaitan dengan Budi Utomo. Setelah tahun 1920, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi perempuan lainnya, yang berbasis keagamaan, seperti Aisyah (1917) gerakan Islam Muhammadiyah, organisasi perempuan Katolik dan Protestan, serta berbagai organisasi perempuan yang muncul di luar Jawa. Menurut Saskia Wieringa, mengamati bahwa Serikat Rakyat berperan cukup aktif dalam mengorganisir buruh perempuan untuk melakukan demonstrasi penuntutan kenaikan upah, dan sebagainya.

Pada tahun 1926, terdapat salah satu aksi besar yang dilakukan oleh organisasi ini yaitu menuntut peningkatan kondisi para buruh perempuan. Pada tahun ini juga aksi pemberontakan oleh kaum komunis sedang memanas, sehingga buruh perempuan juga tidak luput dari penangkapan dan penahanan. Hal ini berbuntut pada para buruh laki-laki dan perempuan ini dibuang ke sebuah kamp konsentrasi Belanda di Boven Digul, Irian Jaya, Papua (Wieringa, S. 2010: 27-28).

Pemerintah kolonial Belanda melakukan langkah pertama yang masuk akal untuk menangani permasalahan yang terjadi pasca pemberontakan, yaitu dengan melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK), dan melakukan pengorganisasian kembali para buruh yang bekerja agar dapat menghemat biaya. Target dari PHK yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah para buruh yang dinilai kurang terampil dalam melakukan pekerjaannya. Keadaan yang masih lumayan baik ada pada buruh-buruh di Surabaya karena hanya terkena penurunan upah saja (Saptari. 2013).

Pihak pemerintah memberikan solusi untuk mendirikan komite-komite yang memiliki peran

untuk mengurus para buruh yang menjadi pengangguran. Kegiatan dari komite tersebut adalah mencari dan menghimpun dana, serta pakaian yang nantinya akan dibagikan kepada para buruh tadi. Setelahnya, didirikan juga balai pelatihan dan usaha kecil oleh para komite agar para buruh yang menganggur dapat memiliki kegiatan, mengasah skill, dan diharapkan nantinya dapat membuka pekerjaan baru. Dana penolong juga telah disiapkan oleh pihak pemerintah meskipun masih banyak diterima oleh kaum Eropa. Buktinya dapat dilihat pada industri pabrik gula, kaum Eropa yang mendapatkan dana penolong hingga sebanyak 7.644 orang sedangkan hanya sekitar 700 buruh pribumi saja yang mendapatkan dana penolong dari pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan nasib para buruh pada masa depresi ekonomi pada masa itu. Kebijakan penghematan tadi mengakibatkan penurunan upah yang harusnya diterima oleh para buruh, hingga parahnya adalah adanya PHK (Tricahyono, D. 2020: 9).

5. Keadaan Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Emas Pasca Pemberontakan PKI 1926-1927

Serikat-serikat buruh di Semarang tidak lagi banyak menyerukan dan menunjukkan gerakannya pada pemerintah kolonial Belanda pasca terjadinya pemogokan besar-besaran pada tahun 1925. Hingga pada tahun selanjutnya juga tidak banyak aksi besar yang ditunjukkan oleh para buruh, apalagi untuk melakukan pemogokan kembali di Semarang. Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL) pun tidak terlihat kembali aktivitasnya pasca pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tongkang yang terjadi pada September tahun 1925. Kemudian aktivitas-aktivitas serikat buruh lainnya yang berada di bawah naungan PKI mengalami kesulitan dan banyak yang bubar setelah adanya penangkapan para pemimpin pemogokan dan pembubaran PKI pada tahun 1926-1927. Organisasi-organisasi yang tidak ikut terlibat dalam dunia perpolitikan dan aksi-aksi pemogokan buruh diberikan ruang gerak oleh pemerintah kolonial Belanda (Supriyono, 2008: 164).

Pada masa-masa inilah pergerakan kaum buruh pribumi banyak berfokus pada pemikiran-pemikiran saja tanpa melakukan tindakan dan menyuarakan aksi pergerakan. Kaum-kaum terpelajar dituntut untuk sadar akan kedudukannya dan mulai

memikirkan strategi baru dalam melakukan perbaikan nasib para buruh, karena hal tersebut bukanlah sebuah hal yang mudah. Semaun sebagai seorang tokoh yang mendirikan dan mengembangkan serikat buruh di Semarang telah pergi ke Belanda pada Agustus tahun 1923. Kemudian ditambah dengan terjadinya kemunduran PKI pada tahun 1927 menjadi sebuah pukulan besar pada perkembangan serikat buruh di Semarang (McVey, 2009).

Pada saat itu pemerintah tidak melakukan larangan terhadap pembentukan serikat, tetapi lebih memperketat syarat-syarat dalam pembentukannya, yakni Pertama, dalam hal menetapkan pemimpin harus berasal dari para buruh itu sendiri dan bukan berasal dari pihak aktivis politik. Kedua, serikat yang dibentuk harus berdiri sendiri dan terpisah tanpa campur tangan dari partai politik. Serikat tidak diperbolehkan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan isu politik. Ketiga, tujuan dari adanya serikat hanya berfokus tentang masalah-masalah perburuhan yaitu mengenai upah pekerja, tempat pengaduan mengenai majikan, dan masalah mengenai kesejahteraan buruh, yang dilakukan tanpa adanya aksi konfrontasi (Ingleson, 2015).

Mental para pekerja perkotaan sedang mengalami perubahan yang signifikan dan bertahan lama pada dekade-dekade terakhir pemerintahan kolonial. Perubahan ini diakui oleh para administrator kolonial, para manajer Eropa, dan para intelektual perkotaan Indonesia. Perubahan-perubahan ini terlihat jelas di kalangan pekerja semi-proletar, serta di antara mereka yang secara tegas didefinisikan sebagai proletariat perkotaan; namun di antara perubahan-perubahan tersebut perubahannya paling mendalam dan mencolok. Banyak kampung tumbuh secara organik seiring dengan berkembangnya kota-kota besar dan kecil, dan di sini terdapat kesinambungan antara struktur-struktur sosial dan politik yang baru muncul dengan struktur-struktur di masa lalu. Namun di kampung-kampung lain yang tumbuh di daerah baru, atau yang berkembang pesat seiring dengan kedatangan pendatang baru, tidak mengherankan jika ditemukan rasa tidak aman yang kuat (Ingleson, 1981).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kondisi di Semarang, khususnya pada pelabuhan Tanjung Emas menyebabkan dinamika yang terjadi pada masyarakatnya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Posisi Kota Semarang yang cukup strategis, dan didukung dengan menjadi wilayah hinterland dengan wilayah foreland mengakibatkan banyaknya buruh yang datang untuk mencari pekerjaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan mengenai berbagai pergolakan dari internal organisasi buruh pelabuhan Semarang, maupun yang ditanggung oleh PKI. Kesadaran akan kelas buruh juga meningkat pada saat yang bersamaan karena adanya rasa ingin mengubah nasib dan perekonomian kaum buruh. Buruh pelabuhan yang memiliki andil besar dalam pemogokan-pemogokan yang terjadi pada tahun 1918 dan 1925 adalah buruh tongkang karena dianggap sebagai buruh elit. Posisinya sebagai buruh yang memiliki keahlian khusus sehingga para pengusaha di perusahaan bongkar muat SSPV tidak bisa seenaknya untuk memecat para buruh tongkang tersebut. Akan tetapi pada pemogokan 1918 terjadi kegagalan karena kurang kompak dalam melakukan aksi. Sehingga setelah mulai munculnya organisasi-organisasi buruh pelabuhan, aksi pemogokan pada tahun 1925 cukup terorganisir. Dampak dari berbagai pemogokan buruh pelabuhan dan pemberontakan PKI 1926-1927 adalah penangkapan dan pengasingan ke Kamp Boven Digul di Irian Jaya. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadinya PHK (Putus Hubungan Kerja) pada buruh-buruh yang keterampilannya kurang untuk menstabilkan perekonomian pasca terjadinya pemogokan-pemogokan. Pihak pemerintah juga menerapkan aturan ketat dalam pembentukan organisasi atau serikat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas PKI.

REFERENSI

- Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931
- Verslag van het Bestuur N.V. Semarangsch Stoomboot en Prauwenveer over het jaar 1924
- Verslag van den Raad van Commissarissen van het SSPV over het jaar 1925 (1926)
- Verslag van den Handelsvereniging te Semarang over het jaar 1919
- De Locomotief, 5 Agustus 1925
- Eka Diah Kirana (2015) Aktivitas Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 1910-1942. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

- Satria P, Andhika (2014) Wabah Pes Di Kota Semarang Tahun 1916-1918. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nur, Laili Mardhiyani (2015) Kebijakan Redaksional Harian Suara Merdeka tentang Pemberitaan Kearifan Lokal Semarang di Edisi Lokal Semarang Metro. Masters thesis, Postgraduate Program in Communication Studies.
- Novita, A. (2014). Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913-1925. *Journal of Indonesian History*, 3(2).
- Ingleson, J. (1983) Life and Work in Colonial Cities: Harbour Workers in Java in the 1910s and 1920s. *Modern Asian Studies*, Vol. 17, No. 3 (1983), pp. 455-476.
- Ingleson. J. (1981) "Bound Hand and Foot': Railway Workers and the 1923 Strike in Java." *Indonesia*, no.31
- Hasibuan, S. (1968). Political Unionism and Economic Development in Indonesia: Case Study, North Sumatra. University of California.
- Nurhabsyah. 2004. Pemberontakan PKI di Silungkung Tahun 1997. e-USU Repositoty. Universitas Sumatera Utara
- Nurhajarini, D. R., Fibiona, I., & Suwarno. (2019). Kota Pelabuhan Semarang Dalam Kuasa Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim, Tahun 1800an- 1940an. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sandra. *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta : Pustaka Rakyat. 1961.
- Supriyono, A. (2008). Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi Dan Republik 1900-1965.
- Erman, E., & Saptari, R [editor]. (2013). Dekolonisasi Buruh Kota Dan Pembentukan bangsa. KITLV-Jakarta : Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ruth, T. McVey. 1965. *The Rise of Indonesia Communism* Ithaca, New York: Corneell Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 1993 (cetakan kedelapan). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka. 198.
- Ingleson, J. and Achdian, A. (2015) Buruh, Serikat Dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an. Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Wieringa, S. (2010). Pasang surut gerakan perempuan Indonesia. In *Perempuan dalam relasi agama dan negara* (pp. 26-35). Komnas Perempuan.
- Shiraishi, T. 1997. *Zaman bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Penerjemah Hilmar Farid, - Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Maulida, F. H., (2020, April 13). Spektrum Politik Dan Pemogokan Buruh pelabuhan Semarang dari masa kolonial hingga republik. Binus University Malang Retrieved April 10, 2023, from <https://binus.ac.id/malang/2020/04/spektrum-71politik-dan-pemogokan-buruh-pelabuhan-semarang-dari-masa-kolonial-hingharepublik/>